

TESIS

**PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DIKAITKAN DENGAN
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK WARGA NEGARA INDONESIA
ATAS PEKERJAAN**

OLEH :



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019**

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK WARGA NEGARA INDONESIA ATAS PEKERJAAN

**(Muhammad Faisal, 1720112009 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 122 Halaman, Tahun 2019)**

ABSTRAK

Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia pada saat ini semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan terjadi karena banyaknya investasi asing yang masuk ke Indonesia ditambah peraturan perundang-undangan Indonesia yang mempermudah perizinan tenaga kerja asing. Mudahnya perizinan tenaga kerja asing tersebut juga diringi masih banyaknya tenaga kerja asing ilegal yang ditangkap. Mudahnya perizinan tersebut dikhawatirkan akan mengancam kesempatan kerja bagi tenaga kerja Warga Negara Indonesia. Rumusan masalah dalam tesis ini yaitu bagaimana pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dikaitkan dengan perlindungan hak Warga Negara Indonesia atas pekerjaan? dan bagaimana pelaksanaan penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia terhadap perlindungan hak Warga Negara Indonesia atas pekerjaan?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu dengan mengumpulkan data dari responden yang terkait, yang dalam ini adalah pihak Imigrasi Kelas I TPI Padang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan penggunaan TKA secara yuridis tidak melindungi kepentingan Tenaga Kerja Indonesia, dimana kemudahan perizinan penggunaan TKA terjadi disaat masih kurangnya lapangan pekerjaan bagi Tenaga Kerja Indonesia, masih banyaknya pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negari dan tingginya angka pengangguran yaitu sebesar 6,82 juta orang. Dihilangkannya kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia bagi TKA merugikan Tenaga Kerja Pendamping dalam berkomunikasi. Kemudahan perizinan TKA dalam Perpres No. 20 Tahun 2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 43 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 52 UU Keimigrasian. Pelaksanaan penggunaan TKA terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat. Bentuk perlindungan tersebut dilakukan dengan cara mengharuskan pemberi kerja TKA untuk melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Warga Negara Indonesia pendamping. Selain itu juga dilakukan pengawasan oleh Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi terhadap TKA selama berada di Indonesia, jika ditemukan pelanggaran penggunaan TKA maka sanksi akan diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan perlindungan yang terkendala karena tidak adanya pelaporan data TKA dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi.

Kata Kunci: Penggunaan; Perlindungan; Tenaga Kerja Asing; Hak Warga Negara dan UU Ketenagakerjaan.

USE OF FOREIGN WORKERS IS RELATED TO THE PROTECTION OF INDONESIAN CITIZENS 'RIGHTS FOR EMPLOYMENT

**(Muhammad Faisal, NIM 1720112009, Master of Law, Faculty of Law,
Andalas University, 122 pages, 2019.)**

ABSTRACT

The use of foreign labour in Indonesia nowadays are increase, the increase has been made by the large number of foreign investment that have come into Indonesia plus regulations makes the foreign labour permits easier. The ease with which these foreign labour permits are also comes with the large number of illegal labor being arrested. The ease of the permits are worried will be thereat the chance of the native labour. The formulation of the problems in this thesis become how the rule for the foreign labour in indonesia linked with the protection of the right of Indonesia citizen for job? and how the implementation of the foreign labour use in Indonesia againts the citizen right for job? method that used in this research is emerical jurisdiction, which is with collected data from the respondent that relevant, in this case are immigration first class TPI Padang and labor and transmigration service of West Sumatra, research shows that permits of the foreign labour it doesn't legally protect the interest of the Indonesian labour, which is the ease of the permits for the foreign labour happen when there is still lack of job for the native labour. There is still large overseas shipment of Indonesian labour and high unemployment rate is 6,82 million in number. The removal of Indonesian obligation for the foreign labour disserve the companion labour in communicate. Permits facilities for foreign labour in presidential regulation number 20 of 2018 is againts with the Article 43 of the Labour Act and Article 46 verse 2 and Article 52 of imigration Act. Implementation use of the foreign labour againts protection of the Indonesian labor in province of West Sumatra are carried by employment ministry and transmigration and labour service of West Sumatra. Forms of the protection are done by require a foreign laborer to report the use of foreign labour and conduct education and training for Indonesian national escort. Furthermore also surveillance done by provincial imigration and labour service againts foreign labour as long as they are in Indonesia, if there is any offense of the use of the foreign labour, thus punishment will be given according regulations. Implementation of the protectio has been obstacle due to absence of data reporting labor ministry to provincial labour service

Keyword : Protection; Foreign Labour; Citizen Rights; Labour Act